

REPRESENTASI HEGEMONI KINERJA POLRI DALAM PEMBERITAAN TEROR AIR KERAS NOVEL BASWEDAN DI *KOMPAS.COM*

Dina Etikawati
Universitas Diponegoro
email: dinaetikawati28@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan analisis bahasa fungsional, pemakaian unsur gramatikal menggambarkan realitas sosial yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan representasi kinerja kepolisian tentang kasus teror air keras Novel Baswedan dan upaya hegemoni dalam pemberitaan di *kompas.com*. Penelitian ini menerapkan pendekatan analisis wacana kritis model Fairclough. Data penelitian menggunakan pernyataan langsung kepolisian dalam pemberitaan di *kompas.com*. Data dikumpulkan dari edisi Mei 2017 s/d Desember 2019 yang diseleksi berdasarkan konteks penyelidikan kasus teror air keras Novel Baswedan. Penelitian ini menggunakan total 42 kutipan pernyataan langsung dari 18 teks berita yang dianalisis menggunakan metode abduktif inferen. Hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, lembaga kepolisian diinterpretasikan memiliki kinerja sebagai berikut, bertanggungjawab yang direpresentasikan temuan proses material 39%, berkredibilitas direpresentasikan proses mental 30% dan proses verbal 14%, dan lembaga kooperatif direpresentasikan proses relasional 13% dan proses behavioral 4%. Kedua, pernyataan langsung Polri juga berfungsi sebagai upaya menghegemoni seperti, meyakinkan, mempengaruhi, dan mengontrol pihak lain.

Kata kunci: representasi, kinerja, hegemoni

THE REPRESENTATION OF POLRI PERFORMANCE HEGEMONY IN NOVEL BASWEDAN ACID ATTACK NEWS ON *KOMPAS.COM*

Abstract

Based on the analysis of functional language, the use of grammatical elements illustrates the existing social reality. This study aims to describe the representation of the police's performance in investigating the case of Novel Baswedan acid attack and the hegemony efforts in reporting in *Kompas.com*. This study applies the approach of analysis of Fairclough's critical discourse. The research data were taken from the police's direct statement in the news in *Kompas.com*. The data were collected from the May 2017 to the December 2019 editions and were selected based on the context of the investigation of Novel Baswedan's acid attack. This study used a total of 42 direct statement excerpts from 18 news that were analyzed using inferent abductive methods. The research results are as follows. First, the police institution is interpreted to have responsible performance that is represented by the findings of the material process of 39%; credibility is represented

by mental processes of 30% and verbal processes of 14%; and the cooperative institutions represent a relational process of 13% and behavioral processes of 4%. Second, The Police's direct statement also functions as an attempt to hegemony such as, convincing, influencing, and controlling other parties.

Keywords: representation, performance, hegemony

PENDAHULUAN

Analisis wacana kritis memiliki pandangan bahwa bahasa merupakan bagian dari sebuah peristiwa sosial. Fairclough (2001), mengemukakan bahwa bahasa merupakan bentuk dari praktik sosial yang berhubungan dengan kekuasaan dan kekuatan. Sehubungan dengan itu, bahasa tidak sekadar dianalisis berdasarkan tata bahasa dan sintaksis dalam sudut pandang analisis wacana kritis. Akan tetapi, analisis bahasa akan dikaitkan dengan konteks sosial, dimana bahasa tersebut diproduksi. Hal itu terbukti pada data penelitian Mardikantoro (2014), mengemukakan bahwa bahasa tidak hanya sekadar alat penyampaian informasi kepada publik. Bahasa juga dapat digunakan untuk suatu tujuan tertentu termasuk praktik kekuasaan, jikalau dihubungkan dengan konteks yang menyertai.

Pemikiran bahasa dapat menjadi sarana guna praktik sebuah kekuasaan dikemukakan (Gramsci, 1971). Dalam pendapatnya, Gramsci (1997: 32), mengemukakan bahwa sebuah upaya dominasi kekuasaan dan kekuatan dapat dilakukan tidak hanya dengan senjata, tetapi juga dengan penerimaan publik. Penerimaan publik merupakan tujuan dari dominasi kelompok kelas sosial tinggi terhadap kelompok kelas sosial di

bawahnya. Upaya dominasi tersebut dapat tercapai dengan penggunaan tata bahasa dan sintaksis tertentu dalam sebuah wacana. Hal itu senada dengan temuan Abdi, Nurhadi, dan Imam (2016), bahasa dapat digunakan untuk menciptakan sebuah kekuasaan sehingga bahasa memiliki kontrol terhadap orang lain untuk bertindak sesuai yang dikehendaki.

Peranan bahasa yang membentuk wacana dalam upaya dominasi juga diutarakan oleh Fairclough (1995: 94), bahwa aplikasi hegemoni menyiratkan adanya perkembangan dalam berbagai aspek di masyarakat, seperti pekerjaan dan pendidikan, dari praktik-praktik yang menaturalisasi hubungan dan ideologi tertentu. Praktik-praktik yang dilakukan secara naturalisasi tersebut bersifat diskursif. Oleh sebab itu, konvensi yang dilakukan akan ditangkap dengan masuk akal. Di dalam proses naturalisasi wacana tersebut, bahasa menjadi salah satu kunci keberhasilan upaya hegemoni. Hal itu mempertegas bahwa terdapat hubungan ganda antara wacana dengan hegemoni. Pertama, praktik hegemoni dan upaya hegemoni menggunakan bentuk praktik diskursif dalam interaksi secara tertulis ataupun lisan. Kedua, wacana masuk ke dalam lingkup hegemoni budaya.

Berdasarkan pemikiran tentang adanya hubungan wacana dengan

hegemoni, dapat disimpulkan bahwa pendekatan analisis wacana kritis dan teori hegemoni bisa dipadukan untuk menganalisis sebuah teks. Van Dijk (1998), berpendapat bahwa analisis wacana kritis adalah sebuah bidang studi yang mempelajari dan mengkaji teks dan ujaran untuk mengungkap sumber diskursif dari kekuasaan, dominasi, ketidaksetaraan, dan bias. Pandangan tersebut serupa dengan Fairclough (1995), menyatakan analisis wacana kritis bertujuan untuk menganalisis secara sistematis hubungan yang bias dari kausatif dan determinasi antara (a) praktik diskursif, peristiwa, dan teks, dan (b) struktur sosial dan budaya, relasi, dan proses dalam cakupan luas. Definisi lain mengenai konsep analisis wacana kritis dapat merujuk kepada pendapat Gee (1999), Wodak (1996), dan lainnya.

Penelitian analisis pernyataan langsung kepolisian mengenai penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan menggunakan wacana kritis Fairclough. Fairclough (2001: 21), membagi analisis wacana kritis menjadi tiga dimensi, (a) deskripsi, tahap yang berkaitan dengan teks sebagai properti utama; (b) interpretasi, tahap yang fokus analisis hubungan antara teks dan interaksi; dan (c) eksplanasi, tahap akhir fokus pada analisis hubungan antara interaksi dengan konteks sosial. Ketiga tahapan tersebut tidak berdiri sendiri. Akan tetapi, proses analisis saling bertautan antara hubungan teks, proses, dan konteks sosial yang menyertai.

Konsep model analisis wacana kritis Fairclough (2001) memiliki keterkaitan dengan studi sistemik fungsional linguistik Halliday. Keterkaitan tersebut ada di

pemikiran yang sama bahwa bahasa dalam wujudnya sebagai teks merupakan sebagai praktik sosial. Teks merupakan sebuah produk dan wacana berisi semua proses interaksi sosial yang direpresentasi melalui unsur linguistik di dalam teks. Unsur-unsur linguistik tersebut dapat dianalisis secara terperinci untuk mengungkap hal yang tersirat. Pemikiran tentang teks tersebut serupa dengan pandangan Halliday dan Matthiessen (2004: 29), bahasa memiliki tiga metafungsi, a) fungsi ideasional, b) fungsi interpersonal, dan c) fungsi tekstual. Unsur linguistik yang membentuk teks merupakan representasi dari pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penutur. Oleh sebab itu, pada tahap interpretasi wacana Fairclough, unsur linguistik dari teks dapat dikaji dengan penerapan sistemik fungsional Halliday. Sistemik fungsional linguistik Halliday memiliki beberapa teori untuk mengkaji teks, salah satunya transitivitas yang terdiri atas proses, partisipan, dan sirkumstan.

Transitivitas merupakan sistem untuk menafsirkan pengalaman penutur sebagai bagian jenis proses yang melibatkan partisipan dan sirkumstan (Halliday dan Matthiessen (2004:170). Pemikiran tersebut selaras dengan Yuliana, Manda, dan Kamsinah (2018), bahwa transitivitas bisa memperlihatkan bagaimana manusia mendeskripsikan pengalaman berdasarkan keadaan sekitar yang menyertai. Pengalaman, ide, serta rencana yang dimiliki oleh penutur akan suatu hal dapat tergambar dari bahasa yang digunakan. Dan, pada momen tersebut transitivitas berperan sebagai alat pengurai hal yang tersimpang lewat bahasa. Hal itu juga termuat dalam data penelitian

Kusumawardani dan I Ketut (2020), tentang praktik berbahasa pada teks pidato pelantikan Presiden Joko Widodo yang sarat visi-misi kepala Negara.

Proses terbagi ke dalam lima tipe, yaitu proses material, proses mental, proses behavioral, proses verbal, dan proses relasional. Gerot dan Wignell (1995:55), menjelaskan bahwa proses material menggambarkan ekspresi yang dilakukan oleh suatu entitas fisik. Proses material yakni suatu proses yang melakukan sebuah tindakan. Tindakan tersebut dilakukan oleh *actor* dan tindakan yang dikenai disebut *goal*. Proses mental berkaitan dengan indera perasa berupa merasakan, berpikir, dan persepsi terhadap suatu hal. Pandangan tersebut dikutip oleh Wiratno (2018: 94), bahwa beberapa penanda Bahasa Indonesia proses mental mengenai persepsi, di antaranya melihat, mendengar, dan merasa; afeksi meliputi takut, suka, dan khawatir; kognisi meliputi berpikir, mengerti, dan membayangkan; dan keinginan misal berharap. Partisipan proses mental meliputi *senser* dan *phenomenon*. Halliday dan Matthiessen (2004: 182), menjelaskan proses verbal merupakan tipe proses hubungan secara simbolik yang dilakukan atas kesadaran manusia dengan penanda bahasa. Proses verbal memiliki tiga partisipan, yaitu target *reciever*, *verbiage*, dan *receiver*. Tipe proses terakhir yakni proses relasional, dimana klausa digunakan untuk mengklasifikasi dan identifikasi suatu hal. Secara rinci penerapan sistem transtivitas dapat dirujuk dalam Eggins (1994), Gerot dan Wignell (1995), dan Halliday dan Matthiessen (2004).

Unsur linguistik dalam wacana dapat dikaji berdasarkan sistemik fungsional

linguistik. Proses tersebut jika diselaraskan dengan tahap analisis wacana kritis Fairclough maka berada di tahap deksripsi. Pada tahap deskripsi unsur-unsur linguistik yang hadir akan dikaji agar mendapatkan hasil representasi penggambaran pengalaman dari makhluk hidup terhadap kondisi sekitarnya. Tahap interpretasi mengeksplorasi hubungan antara teks dengan 'apa' yang diinterpretasikan. Proses tersebut melibatkan dasar pengetahuan (*members' resources*) sebagai pentu hasil yang diperoleh interpreter (Fairclough, 2001: 118). Peran hegemoni Gramsci dalam tahap analisis ini akan diperlukan pada tahapan eksplanasi. Aspek praktik sosiokultural ada dalam tahap eksplanasi, yakni tahapan yang bertujuan menggambarkan bahwa wacana sebagai bagian dari proses sosiadan berperan sebagai praksis sosial. Dan juga, bagaimana struktur sosial membentuk *members' resource* yang berdampak terbentuknya wacana, dimana nanti wacana berpengaruh tersebut terhadap pemertahanan atau perubahan MR sehingga dapat menyebabkan terjadi permertahan atau perubahan struktur sosial. Keberadaan hegemoni yang tersirat dalam teks dapat terlihat di tahap eksplanasi. Hal itu ditegaskan oleh Fairclough (1995: 2), teori hegemoni Gramsci berada di dalam analisis dari praksis sosiokultural.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki peran yang lebih besar, disamping menjadi alat komunikasi dan pertukaran informasi lisan maupun tulis. Bahasa dapat menjadi pengungkap ide, pemikiran, dan rasa antar satu pihak

dengan yang lain. Oleh sebab itu, bahasa dapat menjadi suatu hal yang penting dalam membongkar realitas tersembunyi antara teks dan konteks. Fenomena peran strategis bahasa sebagai media komunikasi juga terjadi dalam pernyataan-pernyataan langsung kepolisian tentang kasus penyerangan air keras Novel Baswedan. Pernyataan-pernyataan kepolisian yang dimuat oleh media dapat memberikan efek lebih selain bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat. Efek lain itu dapat muncul, karena media memiliki kekuatan untuk menghegemoni didukung dengan narasi dan hasil wawancara narasumber. Hal itu dibuktikan dalam penelitian Hasan dan Ali (2017), bahwa pemberitaan media dapat menjadi konstruksi dari sebuah realitas suatu peristiwa sehingga membentuk wacana.

Peristiwa yang menimpa Novel memimbulkan pemberitaan dari berbagai sudut pandang. Salah satu sudut pandang pemberitaan yakni waktu yang diperlukan kepolisian untuk mengungkap pelaku dan motif. Waktu yang tergolong relatif lama, berkisar hampir 3 tahun, menimbulkan beberapa asumsi di publik. Asumsi tersebut muncul dari beberapa pihak, di antaranya Novel Baswedan, Danhil Anzar (Ketua PP Muhammadiyah), dan Fadli Zon. Salah satu pernyataan tersebut berasal dari pihak korban yang dirilis oleh majalah *Time* edisi 13 Juni 2017. Di dalam sesi wawancara dengan *Time*, Novel memberikan pernyataan bahwa Novel mendapatkan informasi mengenai kemungkinan keterlibatan oknum kepolisian dalam kasus penyerangannya. Pernyataan yang dirilis dalam majalah

tersebut menjadi pematik munculnya keraguan di publik terhadap kinerja Polri terkait kasus ini. Kepolisian juga memberikan respon terhadap informasi yang berkebang melalui media.

Pernyataan kepolisian tentang proses investigasi kasus penyerangan Novel dalam pemberitaan *kompas.com* merupakan salah satu bentuk wacana. Penggunaan bahasa dalam wacana tersebut memiliki kekuatan yang dapat berdampak terhadap publik. Bahasa memiliki fungsi bukan hanya sebatas alat komunikasi atau pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk kekuasaan (hegemoni). Pemikiran itu dilandaskan pada realita bahwa dalam berkomunikasi, penutur akan upaya untuk dipatuhi, dihormati, dan dipercaya selain dipahami. Penutur dalam konteks penelitian ini yaitu kepolisian sebagai lembaga hukum berwenang dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Kepolisian memiliki daya untuk memungkinkan upaya hegemoni melalui wacana tersebut.

Penelitian ini berbeda dengan referensi penelitian terdahulu, yakni penggunaan transitivitas sebagai alat untuk membongkar upaya hegemoni dengan berlandaskan analisis wacana kritis. Fokus dalam kajian ini yakni upaya hegemoni pihak kepolisian terkait proses investigasi kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. Upaya tersebut diduga guna menetralsir beberapa asumsi negatif yang muncul di publik. Penelitian ini akan menjabarkan representasi bentuk kinerja yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan bagaimana upaya hegemoni yang dilakan oleh kepolisian melalui pilihan diksinya. Tujuan yang

ingin dicapai melalui permasalahan tersebut ialah, a) mendeskripsikan bentuk kinerja Polri yang terepresentasi melalui unsur linguistik dalam wacana, dan b) menjabarkan upaya hegemoni dalam pernyataan-pernyataan kepolisian.

Fokus dalam kajian ini yakni upaya hegemoni pihak kepolisian terkait proses investigasi kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. Upaya tersebut diduga guna menetralsir beberapa asumsi negatif yang muncul di publik. Penelitian ini akan menjabarkan representasi dari kinerja yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan bagaimana upaya hegemoni yang dilakan oleh kepolisian melalui pilihan diksinya. Tujuan yang ingin dicapai melalui permasalahan tersebut ialah, a) mendeskripsikan kinerja Polri yang terepresentasi melalui unsur linguistik dalam wacana, dan b) menjabarkan fungsi dari wacana Polri dalam upaya untuk menghegemoni.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif Moleong (2005:11). menjelaskan penelitian kualitatif memahami suatu fenomena pada subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi dan sebagainya secara keseluruhan kemudian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata. Bersifat kualitatif, dikarenakan fenomena permasalahan dalam penelitian diungkapkan dalam bentuk pendeksripsian yang menggunakan kata-kata. Dan juga, diperkuat dengan pendekatan analisis wacana kritis model Fairclough (1995) yang melihat wacana sebagai teks sehingga dinilai dapat merepresentasikan pengalaman dan pemahaman pembuat teks. Oleh sebab

itu, kajian ini akan melalui tahap deksripsi, interpretasi, dan eksplanasi guna menelisis representasi hegemoni kinerja kepolisian melalui pernyataan-pernyataan yang diproduksi.

Sumber data penelitian ialah teks berita mengenai peneroran air keras terhadap Novel Baswedan yang dimuat *kompas.com*. Teks berita yang digunakan yakni edisi dalam rentang waktu Mei 2017 sampai dengan Desember 2019. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu unsur-unsur linguistik meliputi, kata, klausa, dan kalimat dari kutipan pernyataan-pernyataan pihak kepolisian. Kutipan pernyataan-pernyataan langsung kepolisian dalam teks berita merupakan transkrip hasil wawancara antara wartawan dan kepolisian. Data penelitian dikumpulkan dengan metode simak dan teknik catat. Sudaryanto (2015:206), menjelaskan bahwa metode simak dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa dalam bentuk lisan maupun tulis. Proses pengumpulan data dengan metode simak juga didukung teknik catat yang dilakukan dengan mencatat temuan kata, klausa, dan kalimat dalam kutipan pernyataan Polri. Temuan unsur-unsur linguistik tersebut dicatat dalam kartu data. Langkah pertama, peneliti menyimak teks berita *kompas.com* yang mengandung kutipan pernyataan Polri mengenai penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan. Hal itu bertujuan untuk menemukan unsur linguistik dalam kutipan pernyataan langsung Polri tersebut. Kedua, temuan unsur linguistik berkaitan dengan permasalahan penelitian dicatat dalam kartu data.

Metode analisis data penelitian ini disesuaikan dengan perspektif analisis

wacana kritis Fairclough (Fairclough, 1995) dan metode abduktif inferensi (Krippendorff, 2004). Fairclough (1995) membagi tiga tahapan analisis wacana kritis, yaitu deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Tahap deskripsi, teks kutipan langsung pernyataan Polri dianalisis dari segi temuan tata bahasa. Pada tahap deskripsi, teori transitivitas Halliday digunakan sebagai pijakan teori dalam menganalisis klausa. Tahap interpretasi berkaitan dengan proses penafsiran teks kutipan pernyataan Polri yang dikaitkan dengan tindakan praktik wacana. Tahap terakhir, tahapan eksplanasi bertujuan untuk mencari simpulan atas penafsiran yang didapat dari tahap interpretasi. Hal itu tersebut juga diterapkan untuk menyimpulkan mengapa pernyataan langsung Polri tersebut di produksi. Di sisi lain, terdapat metode analisis isi yakni abduktif inferensi juga disertakan guna menguak kemungkinan adanya upaya hegemoni dalam fenomena tersebut. Krippendorff (2004: 36), mendefinisikan metode abduktif inferensi merupakan metode analisis yang digunakan dengan cara menarik kesimpulan antar teks yang telah dihubungkan. Hal tersebut diterapkan dalam menganalisis kutipan pernyataan-pernyataan Polri untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Teks yang dimuat media mampu untuk mengkonstruksikan sebuah realitas sosial. Analisis teks berdasarkan analisis wacana kritis Fairclough dapat mengungkap maksud yang tersembunyi dari sebuah teks (Hasanah dan Mardikantoro, 2017).

Pernyataan langsung kepolisian mengenai kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dapat menggambarkan sebuah realitas peristiwa itu. Penggunaan tata bahasa dalam pernyataan langsung menjadi alat untuk mengungkap maksud yang dikehendaki.

Muhajir (2018), pilihan kosakata, tata bahasa, dan struktur teks dalam wacana dapat merepresentasikan ide, pengalaman manusia, dan nilai ideologis. Ide, pengalaman manusia, dan nilai ideologis yang direpresentasikan oleh suatu bentuk sistem transitivitas dapat menyimpulkan suatu hal. Serupa dengan Wiratno (2018), bahwa klausa berperan sebagai sarana aktualisasi pola pengalaman pengguna bahasa terhadap peristiwa disekitarnya. Pola pengalaman tersebut direpresentasikan dalam bentuk proses material, proses verbal, proses mental, proses behavioral, dan poses relasional. Hal itu berdasar pada pemikiran Halliday dan Mathiessen (2004), bahwa transitivitas dapat menunjukkan adanya makna representasi di dalam klausa, berupa proses yang berkaitan dengan sirkumstan dan partisipan.

Temuan pertama, Pernyataan langsung kepolisian dianalisis menggunakan sistem transitivitas guna mengetahui makna yang direpresentasikan melalui penggunaan klausa. Klausa-klausa yang diidentifikasi berdasarkan temuan tipe proses dapat menyiratkan sebuah makna tentang kinerja Polri dalam kasus peneroran Novel Baswedan. Penjelasan terperinci akan dipaparkan di pembahasan berikut. Temuan total 74 klausa dari 42 kutipan pernyataan kepolisian teridentifikasi tipe-tipe proses, sebagai berikut:

Tabel 1. Representasi Kinerja Polri berdasarkan Analisis Transitivitas

| No | Representasi Kinerja | Proses | Persentase |
|----|-------------------------------------|-------------------|------------|
| 1. | Bentuk tanggung jawab kepolisian | Proses Material | 39% |
| 2. | Bentuk kredibilitas dari kepolisian | Proses Mental | 30% |
| 3. | Bentuk kooperatif dari kepolisian | Proses Verbal | 14% |
| | | Proses Relasional | 9% |
| | | Proses behavioral | 4% |

Bentuk-bentuk kinerja kepolisian dalam penanganan kasus penyerangan Novel disimpulkan dari temuan klausa-klausa. Temuan klausa yang teridentifikasi ke dalam tipe proses merupakan representasi dari ekspresi pengalaman kepolisian terkait proses penyelidikan kasus tersebut. Interpretasi tersebut tidak sebatas dari proses, tetapi juga menghubungkan proses dengan keberadaan sirkumstan dan partisipan. Temuan partisipan aktor dalam data mendominasi kemunculan sebanyak 30 kali (27%). Disusul dengan partisipan peran *senser* 21 kali (19%) dan partisipan *goal* 16 kali (14%). Sementara peran partisipan yang muncul di bawah persentase 10%. Dan untuk dominasi sirkumstan dengan frekuensi kemunculan tertinggi ialah sirkumstan masalah (*matter*) 23 kali (46%), kemudian disusul sirkumstan cara (*manner*) dengan frekuensi kemunculan 19 kali (27,5%). Sementara jenis sirkumstan lain, meliputi sirkumstan lokasi (*location*), sirkumstan rentang (*extent*), sirkumstan penyerta (*accompaniment*), sirkumstan lingkungan (*contingency*), sirkumstan pandangan (*angel*) memiliki frekuensi kemunculan di bawah

10%. Temuan entitas yang memiliki peran sebagai proses, partisipan, dan sirkumstan dianalisis berkesinambungan untuk mendapatkan 'suatu hal' yang tersirat dalam wacana tersebut. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Fauzan (2015), mengenai penggunaan transitivitas guna mengetahui representasi TV One dalam memberitakan kasus lumpur lapindo.

Temuan kedua, kinerja Polri yang direpresentasikan oleh penggunaan bahasa dapat menyiratkan adanya sebuah dominasi. Temuan dari representasi kinerja kepolisian dapat menjadi alat untuk menghegemoni pihak lain. Pernyataan langsung kepolisian dapat memiliki fungsi tersirat selain untuk memberikan informasi dan klarifikasi. Senada dengan pemikiran Siregar, dan Else (2019), bahwa pemilihan kosa kata dapat mengkonstruksikan sebuah bentuk atau upaya hegemoni. Wacana yang diproduksi oleh kepolisian tentang kasus peneroran terhadap Novel Baswedan berpotensi memiliki kekuatan dalam menghegemoni masyarakat, sebagai berikut ini.

PEMBAHASAN

Representasi Kinerja Kepolisian

Pernyataan langsung Polri yang termuat dalam 18 artikel berita di media *kompas.com* menyiratkan beberapa bentuk kinerja dari kepolisian. Bentuk kinerja Polri direpresentasikan oleh penggunaan dari klausa-klausa. Klausa dipandang sebagai unsur linguistik yang menjadi sumber makna untuk merepresentasikan sebuah pengalaman. Hal itu diutarakan juga oleh Wiratno (2018:91), bahwa klausa dalam makna ideasional sebagai sarana aktualisasi pengalaman dari pengguna bahasa terhadap peristiwa di sekitarnya. Pola pengalaman tersebut direpresentasikan klausa-klausa yang terklasifikasi ke dalam beberapa tipe proses. Halliday dan Matthiessen (2004), menjelaskan bahwa proses merupakan suatu entitas yang merujuk pada suatu kegiatan atau aktifitas dalam sebuah klausa. Dimana peran partisipan sebagai orang atau benda dalam proses dan sirkumstan sebagai lingkungan terjadi proses yang melibatkan partisipan. Hal itu senada dengan kajian Usman (2015), makna atau nilai yang terkandung dalam teks wacana dapat teridentifikasi melalui analisis proses, partisipan, dan sirkumstan yang saling terhubung. Pandangan tersebut menjadi dasar dalam mengkaji representasi kinerja. Berdasarkan analisis, menunjukkan bahwa temuan klausa dari pernyataan langsung kepolisian yang merepresentasikan kinerja kepolisian terbagi ke dalam beberapa proses, yakni proses material, proses mental, proses verbal, proses behavioral, dan proses relasional. Berikut

ini temuan bentuk kinerja kepolisian yang direpresentasi melalui temuan klausa dalam pernyataan langsung mereka.

Bentuk Tanggung Jawab Kepolisian

Kinerja Polri dalam menyelesaikan kasus penyerangan air keras Novel Baswedan yang direpresentasikan klausa-klausa proses material adalah bentuk tanggung jawab Polri. Proses material merupakan proses yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan atau peristiwa terjadi. Dan juga proses material bersifat konkret yang mengindikasikan aktivitas fisik (Halliday dan Matthiessen, 2004). Pernyataan langsung Polri dalam data penelitian ditemukan adanya proses material dengan persentase 39% dari klausa yang berjumlah 29 klausa proses material. Klausa-klausa yang teridentifikasi sebagai proses material dapat disimpulkan merepresentasikan bentuk tanggung jawab kepolisian dalam kasus itu. Representasi itu diperoleh dengan menarik garis merah dari temuan klausa-klausa proses material, kemudian dihubungkan dengan partisipan dan sirkumstan fomonema kebahasaan tersebut. Hal itu senada dengan tulisan Liao dan Geling (2019), dalam mengidentifikasi perbedaan ideologi dalam teks pidato pelantikan Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping. Proses material memperlihatkan hal-hal atau tindakan konkret yang telah dilakukan oleh kepolisian. Berikut ini temuan beberapa bentuk lingual yang merepresentasikan proses material.

Tabel 2. Temuan Proses Material

| No | Actor | Process: material | Goal |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kita | tidak mungkin ambil, sudah memberikan, udah upayakan | pelaku daftar pertanyaan, pengungkapan kasus itu dalam berita acara |
| | | Tuangkan ambil, tangkap, kerja ada kerja sama | |
| 2. | Kami | tinggal tambah, kerja, bekerja mempersiapkan, koordinasi tetap melibatkan, sudah meminta | beberapa penyidik anggota KPK support |
| | | Mendapatkan sudah mengamankan | dua pelaku |
| 3. | tim penyidik | terus bekerja, datang | melakukan penyidikan |
| 4. | Saya | Membentuk | satuan tugas |
| 5. | Dia (Polda) | Menangani | kasus |
| 6. | Novel | berikan, menuding | informasi |
| 7. | (kamu) | sini kasih | ke saya (kepolisian) |
| 8. | Polisi | tetap melakukan | penyidikan |
| 9. | Kapolri | sudah mengeluarkan | surat perintah |

Tabel 2 menunjukkan temuan bentuk-bentuk proses material dalam klausa di data pernyataan Polri. Temuan klausa-klausa proses material secara keseluruhan merujuk pada tindakan-tindakan konkret yang telah dilakukan oleh instansi kepolisian. Tindakan konkret yang direpresentasikan lewat proses material dapat mengindikasikan adanya bentuk tanggung jawab dari kepolisian. Interpretasi bentuk tanggung jawab Polri diperoleh karena terdapat tindakan konkret yang berujung pada sebuah tujuan yang nyata dari tindakan-tindakan tersebut. Partisipan dari hal-hal yang dirujuk proses material ialah kepolisian, dengan representasi penggunaan kata ganti. Beberapa interpretasi dari sampel data bentuk proses material dijabarkan sebagai berikut.

- (1) *Saya membentuk satuan tugas khusus untuk penanganan kasus Novel ini dengan 166 penyidik* (Ed. 14/3/18)

Kalimat tersebut penggunaan klausa yang mengidentifikasi sebagai proses material. Klausa ‘saya membentuk satuan tugas khusus’ terdapat proses material dengan penjabaran, ‘saya [partisipan] membentuk [proses material] satuan tugas khusus [goal] untuk penanganan kasus Novel ini dengan 166 penyidik sirkumstan]. Penjabaran unsur-unsur tersebut dapat menunjukkan peran nyata partisipan ‘saya’ dalam melakukan suatu langkah penyelidikan konkret. Langkah penyelidikan konkret direpresentasikan oleh verba ‘membentuk’ sebagai penanda proses material. Verba ‘membentuk’ menginterpretasikan sebuah aktifitas nyata yang telah dilakukan dengan tujuan tertentu. Tujuan yang hendak dicapai dari tindakan itu ialah ‘satuan tugas khusus’. Klausa dengan partisipan pronomina ‘saya’ itu dapat menjadi salah satu penanda bentuk perwujudan

pertanggungjawaban Polri terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.

Bentuk proses material lain yang merepresentasikan pertanggungjawaban kepolisian berikut ini:

- (2) *Kami sudah mengamankan dua pelaku RM dan RB (Ed. 27/12/19).*

Kalimat sampel data 2 memiliki penjabaran unsur meliputi, 'kami [partisipan] sudah mengamankan [proses material] dua pelaku RM dan RB [goal]'. Klausa tersebut memiliki partisipan pronomina jamak 'kami' yang merujuk pada instansi kepolisian lebih spesifiknya para tim penyidik kasus Novel. Suatu tindakan konkret yang telah dilakukan partisipan direpresentasikan oleh verba 'sudah mengamankan'. Penggunaan verba 'sudah mengamankan' memberikan gambaran tindakan pengamanan atau penangkapan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Tindakan tersebut menghasilkan tujuan yang telah tercapai yakni 'dua pelaku RM dan RB' [goal]. Representasi bentuk proses material 'sudah mengamankan' dapat diinterpretasikan telah dilakukannya langkah-langkah tertentu dalam proses penyelidikan hingga berhasil menangkap atau mengamankan terduga pelaku. Klausa tersebut dapat merepresentasikan bentuk pertanggungjawaban dari pihak kepolisian yang dapat menentukan kinerja instansi terkait.

Proses material pada tabel 2 ditandai dengan penggunaan verba meliputi 'tidak mungkin ambil', 'sudah memberikan', 'udah upayakan', 'tuangkan', 'ambil', 'tangkap', 'kerja', 'tinggal tambah', 'mempersiapkan', 'koordinasi', 'tetap

melibatkan', 'sudah meminta pendapat', 'terus bekerja', 'datang', 'sudah melangkah', 'membentuk', 'menangani', 'berikan', 'menuding', 'sini kasih', 'tetap melakukan'. Bentuk-bentuk yang merepresentasikan proses material tersebut menunjukkan tindakan yang bersifat aktif dari partisipan. Tindakan-tindakan tersebut berjenis tindakan konkret yang melibatkan aktivitas fisik. Interpretasi tersebut juga didasarkan pada padangan (Gerot & Wignel, 1995), bahwa proses material mengekspresikan suatu hal yang dilakukan oleh entitas fisik. Berdasarkan penelitian, tindakan-tindakan kepolisian yang direpresentasikan dalam proses material merupakan tindakan yang melibatkan aktivitas fisik. Tindakan konkret yang dilakukan memiliki tujuan nyata berkaitan dengan kasus penyerangan Novel. Oleh karena itu, tindakan dalam proses material tersebut dapat menunjukkan bentuk pertanggungjawaban pihak kepolisian. Pernyataan langsung kepolisian dalam data yang teridentifikasi terdapat 39% proses material dapat direpresentasikan adanya upaya pemertegas kinerja kepolisian. Dari penggunaan proses material tersebut, publik dapat memiliki pandangan bahwa instansi kepolisian dapat diinterpretasikan sebagai lembaga dengan karakteristik yang bertanggungjawab. Pernyataan langsung kepolisian yang menyiratkan langkah-langkah investigasi dan hasil yang telah diperoleh dapat menjadi penguat interpretasi kinerja tersebut. Dominasi penggunaan klausa proses material guna merepresentasikan peristiwa, tindakan, atau aktifitas dari partisipan dapat dirujuk pada Yuliana, dkk (2018).

Bentuk kredibilitas Kepolisian

Kredibilitas berkaitan dengan tingkat kepercayaan terhadap individu atau kelompok tentang suatu hal. Rasa kepercayaan tersebut yang coba dibangun oleh kepolisian melalui pernyataan langsung mereka. Beberapa temuan klausa dalam pernyataan langsung kepolisian teridentifikasi sebagai klausa proses mental dan proses verbal. Bentuk proses mental berkaitan dengan tindakan yang melibatkan unsur kognisi, afeksi, keinginan, dan persepsi mengenai kasus penyerangan air keras. Proses mental dalam data teridentifikasi sebanyak 22 klausa dengan persentase 30%. Selain proses mental, proses verbal dalam data pernyataan langsung juga dapat merepresentasikan kepercayaan dari kepolisian. Temuan bentuk kredibilitas kepolisian sebagai representasi kinerja Polri dikarenakan transitivitas sebagai suatu bagian tata bahasa dapat mengidentifikasi sebuah representasi.

Proses mental di dalam sebuah wacana tidak terlepas dari unsur proses merasakan (*sensing*). Proses 'perspektif' merasakan tersebut melibatkan indera

pendengar, penglihat penciuman, pengecap, dan peraba Alvionita (2018). Berikut ini temuan klausa proses mental dalam data melibatkan memiliki bentuk lingual yang merepresentasikan proses, sebagai berikut.

Data Tabel 3 menunjukkan temuan beberapa bentuk proses mental dari pernyataan langsung kepolisian. Keseluruhan data tabel 3 menggunakan pronomina pertama dan ketiga. Pronomina persona tunggal meliputi 'saya' dan pronomina persona jamak yakni 'kita' dan 'kami'. Pronomina ketiga jamak yaitu 'tim'. Pronomina-pronomina tersebut merepresentasikan kepolisian sebagai unsur *senser* dalam proses mental tersebut. *Senser* menjadi pihak yang melakukan tindakan dalam proses mental terkait proses investigasi kasus air keras.

Data proses mental akan dijabarkan beberapa berikut ini mengenai peran *senser* dan interpretasi yang tersirat.

- (3) *Kita akan lakukan penyidikan kalau itu sudah fakta hukum dan ada alat buktinya (Ed. 1/8/2017)*

Tabel 3. Temuan Proses Mental

| No | Senser | Process: mental | Phenomenon |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. | Kita | akan lakukan, akan selidiki akan teruskan mau , mau coba nanti tidak main-main jangan menanggapi | penyidikan periksa, bagus, bersih |
| 2. | Kami | dalami, akan berangkat, menyakini | yang lambat atau menghambat |
| 3. | Tim | bisa, akan melakukan | keterangan, pelaku akan tertangkap |
| 4. | Saya | ingin meyakinkan akan ungkap | kerja sama, analisis TKP penyidik terus bekerja maksimal |
| 5. | Kepolisian | telahempuyai | penyelesaian 60% |

Kalimat 3 menyiratkan proses mental dengan ditandai ‘akan melakukan’ yang diucapkan oleh *senser*, ‘kita’. Hal yang ditandai oleh *senser* yaitu ‘penyidikan’ sebagai *phenomenon* dan dijelaskan lebih lanjut oleh sirkumstan ‘kalau itu ada fakta hukum dan ada alat buktinya’. Pronomina persona pertama jamak ‘kita’ merepresentasikan tim penyidik kepolisian yang memiliki langkah-langkah hukum. Klausula proses mental ‘kita akan melakukan penyidikan’ menyiratkan adanya sebuah langkah hukum yang akan dan dapat ditempuh oleh kepolisian. Langkah hukum melakukan penyelidikan dapat dilaksanakan jika suatu hal dipenuhi, yang direpresentasikan dalam sirkumstan. Klausula dengan proses mental tersebut dapat memberikan rasa percaya dan yakin untuk publik bahwa dapat terselesaikannya kasus penyerangan Novel.

Berdasarkan data Tabel 3 secara dominan menyiratkan adanya upaya untuk menyakinkan publik tentang usaha kepolisian dalam menyelesaikan kasus Novel. Upaya tersebut direpresentasikan oleh verba-verba penanda proses mental. Selain itu, upaya membangun kepercayaan masyarakat diperkuat dari penggunaan modal ‘akan’. Menurut (Alwi,

1992), pemarkah ‘akan’ berjenis modal intensional yang menyatakan makna ‘keakanan’ terhadap suatu hal. Di dalam klausa, modal tersebut dapat diinterpretasikan adanya sebuah keinginan atau tindakan yang hendak dicapai atau dilaksanakan oleh kepolisian untuk memproses kasus tersebut. Jika dilihat dari segi aspektualitas pemarkah modal ‘akan’ bermakna adanya proses yang belum terselesaikan dan memiliki tujuan akhir pasti. Akan tetapi, dalam upaya mencapai tujuan tersebut, partisipan sudah melakukan langkah tertentu. Hal itu, selaras dengan penggunaan pemarkah ‘akan lakukan’, ‘akan selidiki’, dan ‘akan teruskan’ dalam data yang menyiratkan ada sebuah tindakan yang akan dilakukan kepolisian.

Temuan bentuk proses lain dalam data yang mendukung adanya bentuk kredibilitas Polri dalam kinerjanya yakni proses verbal. Kusumawardani dan I Ketut (2020) dalam temuannya, menjelaskan bahwa proses ini dapat menunjukkan aktivitas mengenai komunikasi antarpelibat dalam lingkup komunikasi verbal. Proses verbal yang ditemukan memiliki pemarkah sebagai berikut.

Tabel 4. Temuan Representasi Proses Verbal

| No | Sayer | Process: verbal | Verbiage |
|----|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Saya | tanya, bilang, sampaikan | tugas pokok dan fungsi, kami optimis bisa terungkap, kasus itu ada karekateristiknya masing-masing. |
| 2. | Kita | sudah bilang | tidak semua peristiwa bisa dapat dengan cepat |
| 3. | Penyidik | menanyakan | |
| 4. | keterangan Novel | disampaikan | |

Temuan proses verbal dapat menjadi salah satu bukti kredibilitas yang dimiliki kepolisian. Proses verbal memperlihatkan tindakan yang dilakukan Polri, berupa pemberian penjelasan mengenai keadaan terbaru dan tindakan yang telah dilakukan. Bentuk proses verbal dalam klausa memberikan interpretasi bahwa dengan kewenangannya kepolisian optimis menyelesaikan kasus ini. Hal itu dapat diperjelas dari penjabaran data berikut ini.

- (4) *Saya bilang kan beberapa kali kami optimis bisa terungkap p* (Ed. 12/4/18)

Data 4 mengandung unsur proses verbal yaitu ‘saya [sayer] bilang [proses verbal] kan beberapa kali [sirkusmtan] kami optimis bisa terungkap [verbiage]. Dari penjabaran tersebut terlihat bahwa kepolisian mewartakan rasa optimis mereka bisa mengungkap kasus ini. Hal itu menyiratkan adanya hal-hal yang telah dan bisa dilakukan oleh kepolisian terkait kasus Novel. Dan juga, penggunaan sirkumstan ‘kan beberapa kali’ menunjukkan pengulangan dan informasi konsisten yang diberikan. Oleh sebab itu, proses verbal dapat diinterpretasikan salah satu bentuk kredibilitas yang dimiliki kepolisian

Berdasarkan temuan proses verbal, secara keseluruhan pemarkah proses verbal dengan jelas menyiratkan keadaan, tindakan, dan rencana kepolisiann. Penggunaan pemarkah proses verbal dapat memberikan interpretasi bahwa kepolisian memiliki rencana dan strategi dalam mengungkap kasus tersebut. Dan, hal itu dapat membangun rasa kepercayaan publik terhadap instansi kepolisian. Temuan bentuk kredibilitas yang dimiliki kepolisian didapatkan dari analisis berkesinambungan klausa-klausa proses mental dan proses verbal dengan partisipan dan sirkumstan yang menyertai.

Bentuk Kooperatif Kepolisian

Kooperatif dalam kinerja kepolisian berkaitan upaya melibatkan pihak-pihak lain guna menyelesaikan kasus. Tindakan kepolisian dalam proses hukum kasus ini melibatkan pihak lain, seperti saksi. Hal itu berkaitan juga dengan sikap profesionalitas yang dimiliki oleh kepolisian. Bentuk sikap profesionalitas dan kooperatif Polri terepresentasi dari penggunaan pemarkah proses relasional dan behavioral. Proses relasional ditemukan dalam data sebesar 13% dengan total klausa 9, sedangkan proses behavioral sebesar 5% dengan 4 klausa. Bentuk-bentuk representasi dari proses relasional terbagi menjadi proses relasional atributif dan proses relasional identifikatif disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Temuan Proses Relasional

| Proses Relasional Atributif | | | |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| No | Carrier | Process relational | Attribute |
| 1. | Kami semua | adalah | transaparan, maksimal soal itu |
| 2. | Kita | adalah | profesional |
| Proses Relasional Identifikatif | | | |
| No | Identified | Process relational | Identifier |
| 1. | Semua orang | punya | hak yang sama |
| 2. | Kami | memiliki | kepentingan |

Dari temuan bentuk proses relasional atributif terdapat satu pemarkah sama yaitu 'adalah' dengan *carrier* 'kami semua' dan 'kita'. Proses relasional atributif menunjukkan adanya hubungan yang dimiliki penyandang dengan apa yang disandingkan (Wiratno, 2018). Pada temua data penyandang (*carrier*) merepresentasikan kepolisian dan hal yang disandingkan berupa sikap transparan, maksimal, dan profesionalitas. Perihal yang disandingkan menunjukkan sifat dan tindakan yang diterapkan dalam proses pengungkapan kasus teror air keras kepada Novel.

Proses relasional identifikatif yang ditemukan juga menunjukkan adanya profesionalitas yang dimiliki oleh kepolisian. Bentuk proses relasional tersebut mencirikan perihal yang dimiliki oleh partisipan. Berdasarkan data kepolisian memberi perlakuan sama dihadapan hukum. Hal itu ditunjukkan dalam penggunaan proses relasional identifikatif pada klausa berikut.

- (5) *Semua orang punya hak yang sama*
(Ed. 6/11/17)

Klausa tersebut kutipan dari salah satu pernyataan langsung kepolisian yang menyatakan semua orang memiliki hak yang sama dalam memperjuangkan kebenaran. Hal yang diidentifikasi

ialah 'hak yang sama'. Penggunaan proses relasional dapat diinterpretasikan adanya perlakuan sama terhadap kasus penyerangan air keras. Kepolisian menyiratkan bahwa penyidik KPK, Novel Baswedan memiliki hak sama dalam mencari kebenaran dari penyerangan tersebut. Hal itu serupa temuan Chen (2018), bahwa proses relasional dapat menggambarkan suatu keadaan yang mengandung unsur permanen, objektif, dan wibawa.

Bentuk sikap kooperatif dalam penyelidikan kasus penyerangan itu tercermin juga dari penggunaan pemarkah *prosoes behavioral*. Pemarkah proses *behavioral* yang ditemukan disajikan pada Tabel 6.

Pada Tabel 6 terdapat bentuk proses *behavioral* meliputi 'melihat', 'menyentuh', 'doakan', dan 'tidak menyentuh'. Bentuk-bentuk tersebut merepresntasikan pihak kepolisian, saksi, dan Tim Gabungan Pencari Fakta. Penggunaan proses *behavioral* mencerminkan keadaan yang dapat dilakukan oleh kepolisian. Seperti pada penggunaan proses *behavioral* 'menyentuh' dengan partisipan 'kami', kepolisian. Hal itu merepresentasikan keadaan bahwa pihak kepolisian dapat melakukan langkah dan strategi tertentu guna investigasi kasus penyerangan terhadap Novel.

Tabel 6. Representasi Proses Behavioral

| No | Behaver | Process | |
|----|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Saksi | melihat | Penyerangan |
| 2. | Kami | menyentuh, doakan | hal-hal teknis, semakin hebat dan semakin banyak memberikan keterangan |
| 3. | TGPF | tidak menyentuh | hal-hal teknis |

Penjabaran hasil temuan di atas menunjukkan bahwa sistem transitivitas dapat merepresentasikan bentuk-bentuk dari kinerja kepolisian. Proses dapat merepresentasikan hal, tindakan, keadaan, dan rencana yang dilakukan atau berhubungan dengan kepolisian. Representasi tersebut dapat memunculkan interpretasi di masyarakat terkait kinerja kepolisian dalam kasus Novel. Oleh sebab itu, meskipun proses pengungkapan kasus teror masih berjalan, tetapi lewat penggunaan unsur leksikogramatikal dalam wacana yang dibangun, masyarakat sudah dapat memiliki pandangan bagaimana bentuk kinerjanya.

Upaya Hegemoni Kepolisian

Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh kepolisian tidak sebatas memberikan klarifikasi dan informasi terbaru kepada publik. Kepolisian melalui pernyataan di media, salah satunya *kompas.com*, dapat memberikan hegemoni atau dominasi kepada publik. Temuan hasil penelitian tersebut juga selaras dengan penelitian (Abadi et al. 2017) bahwa ada fungsi lain dari wacana yang diproduksi oleh pihak atau kelompok yang memiliki kekuatan. Akan tetapi, identifikasi unsur hegemoni dalam pernyataan langsung kepolisian ini melibatkan transitivitas guna mengkaji temuan unsur leksikogramatikal. Hasil temuan menunjukkan, bahwa upaya hegemoni dapat dilakukan karena dalam konteks kasus ini, kepolisian memiliki kekuatan dan kewenangan dalam memproses hukum. Kewenangan Polri

sebagai lembaga hukum yang memiliki sarana dan prasarana penunjang proses hukum memberikan kekuatan lebih bagi Polri.

Interpretasi adanya unsur hegemoni dalam wacana yang dibangun kepolisian dilatarbelakangi sebab tertentu. Interpretasi tersebut dapat muncul dari kinerja yang ingin ditunjukkan dihadapan publik. Proses hukum yang masih berjalan dan belum terungkap pelaku menjadi faktor utama. Jeda waktu yang relatif panjang, hampir 3 tahun, memunculkan beberapa keraguan di publik. Keraguan tersebut muncul dari beberapa pihak, seperti yang dikutip dalam pemberitaan media online *merdeka.com* edisi 1 November 2017 dan *detik.com* 3 Januari 2018. Pemberitaan *merdeka.com* berisi tentang usulan pembentukan TGPF yang diutarakan oleh Fadli Zon. *Detik.com* saat itu memberitakan dari pernyataan Danhil Anzar, Ketua Pemuda Muhammadiyah, mengenai rasa kurang optimis bahwa kasus ini dapat terselesaikan. Keraguan yang muncul tersebut dapat dilatarbelakangi banyak faktor, salah satunya sejarah ketegangan yang pernah terjadi antara KPK dan Polri.

Kinerja kepolisian yang direpresentasikan dalam pernyataan langsung dapat menjadi alat untuk menghegemoni. Temuan-temuan bentuk kinerja kepolisian berupa bentuk tanggungjawab, kredibilitas, dan profesionalitas kepolisian dapat menyangkal asumsi-asumsi negatif yang muncul. Hal itu disebabkan karena ada unsur kekuasaan yang tercipta melalui pernyataan langsung kepolisian.

Keadaan tersebut bertujuan agar individu atau kelompok tertentu mengikuti hal yang menjadi tujuan dari pihak dominan. Seperti diungkapkan Gramsci (1971), kelompok dominan akan berusaha memberikan pengaruh kepada kelompok di bawahnya. Berdasarkan analisis, pernyataan langsung kepolisian dapat memiliki fungsi lain yang berdampak kepada masyarakat, yaitu wacana berfungsi untuk meyakinkan masyarakat, wacana berfungsi untuk mempengaruhi masyarakat, dan wacana untuk mengontrol atau mengatur masyarakat.

Wacana kepolisian dapat menyiratkan fungsi untuk meyakinkan masyarakat, selain memberikan informasi terbaru. Usaha meyakinkan masyarakat terlihat dari penggunaan leksikogramatikal yang digunakan. Pemaparan mengenai tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh kepolisian dapat meyakinkan publik. Temuan penggunaan modal juga dapat memperkuat upaya untuk meyakinkan pihak lain. Publik dapat merasa yakin bahwa telah ada usaha nyata dan strategi yang akan dilaksanakan dari kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut. Meskipun, dalam kenyataannya publik dihadapkan bahwa kasus penyerangan air keras terhadap Novel belum terselesaikan. Data pernyataan langsung yang merepresentasikan kinerja kepolisian juga dapat meyakinkan publik tentang adanya progres dari proses hukum tersebut.

Fungsi dari data pernyataan langsung kepolisian selain menyangkal persepsi ketidakooptimisan kepolisian, dapat juga untuk mempengaruhi masyarakat.

Masyarakat telah menerima berbagai pemberitaan penyerangan Novel Baswedan dari berbagai sudut pandang. Dari hasil analisis, bentuk kinerja kepolisian yang terepresentasikan dapat berfungsi untuk mempengaruhi masyarakat akan kesungguhan kepolisian. Masyarakat dapat melakukan dan berpersepsi seperti yang diinginkan. Hasil analisis kinerja kepolisian itu dapat mempengaruhi masyarakat untuk tetap percaya dan merasa yakin bahwa kepolisian akan menyelesaikan tanggungjawabnya secara tuntas. Kewenangan yang dimiliki kepolisian menciptakan adanya upaya hegemoni lewat wacana tersebut.

Kepolisian sebagai penegak hukum yang legal dapat memberikan perintah terhadap hal-hal yang bersangkutan dalam proses hukum. Upaya untuk mengatur juga menjadai salah satu bentuk hegemoni dalam pernyataan langsung kepolisian. Hal itu tersirat dalam penggunaan leksikogramatikal kepolisian yang menyatakan agar kesaksian Novel hendaknya diberikan kepada kepolisian, '*Supaya penyidik Polda Metro Jaya bisa menindaklanjutinya, informasi-informasi yang dianggap penting oleh saudara Novel, hendaknya disampaikan kepada penyidik* (Ed. 15/6/17)'. Kutipan data tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai salah satu bentuk mengontrol dan mengatur dari kepolisian. Kepolisian berwenang terhadap proses penyelidikan kasus ini, sehingga kesaksian Novel mengenai tidak seharusnya diberikan kepada pihak lain. Dari hasil analisis data ditemukan juga upaya untuk mengontrol

agar informasi yang beredar di masyarakat tidak beredar tanpa pertanggungjawaban.

Merujuk pada tahapan analisis wacana kritis Fairclough (1995) keberadaan hegemoni dalam sebuah wacana dapat dijabarkan dalam tahap interpretasi dan eksplanasi. Berdasarkan pernyataan-pernyataan langsung kepolisian dalam data, secara keseluruhan dapat disimpulkan mengandung unsur citra positif bagi kepolisian. Representasi dari kinerja kepolisian menunjukkan hal-hal positif mengenai kepolisian di tengah isu proses hukum kasus Novel Baswedan. Representasi bentuk kinerja kepolisian itu dapat menjadi alat untuk menghegemoni publik melalui wacananya. Situasi tersebut, dapat mempertahankan persepsi kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kredibilitas, profesional, dan bertanggungjawab. Unsur keberadaan media juga memberi pengaruh yang besar dalam upaya hegemoni tersebut. Media *online kompas.com* masuk 4 besar media dengan jumlah pembaca dan kunjungan situs terbanyak menurut survei *cumsocre* pada akhir 2017. Pernyataan langsung kepolisian dalam pemberitaan *kompas.com* juga beberapa kali menjadi topik pemberitaan utama. Oleh karena itu, keberadaan media dalam memberitakan memberikan pengaruh secara tidak langsung pada upaya hegemoni tersebut.

SIMPULAN

Penyataan langsung kepolisian yang merupakan salah satu bentuk wacana yang memiliki tujuan pembuatan. Berdasarkan analisis, dapat ditarik simpulan bahwa pemilihan kata dapat menyiratkan pengalaman, aktivitas, dan peristiwa yang melibatkan penutur. Hal tersebut dapat diketahui dari analisis transitivitas guna melihat hal yang direpresentasikan di dalam klausa. Fenomena tersebut ditemukan di dalam penelitian, bahwa klausa-klausa dalam pernyataan langsung kepolisian merepresntaikan beberapa hal terkait kinerja kepolisian meliputi, 1) bentuk tanggungjawab kepolisian, 2) kredibilitas kepolisian, dan 3) profesionalitas dan kooperatif kepolisian dalam menangani kasus penyerangan Novel.

Temuan lain yakni penggunaan bahasa olah pihak tertentu dalam sebuah wacana dapat menghadirkan unsur hegemoni. Bahasa dapat menghegemoni suatu kelompok jika diproduksi oleh pihak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Hal tersebut ditemukan dalam analisis, bahwa pernyataan yang diproduksi kepolisian memiliki upaya hegemoni kepada publik. Upaya hegemoni yang ditemukan yaitu, menyakinkan publik terhadap kinerja kepolisian, mempengaruhi publik, dan mengatur serta mengontrol situasi yang berkembang di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pencapaian penelitian ini terpublikasi menyertakan peranan berbagai pihak. Terima kasih disampaikan kepada Universitas Diponegoro, intansi yang menaungi dan memberikan fasilitas penelitian secara tidak langsung. Demikian halnya, ucapan terima kasih kepada *Litera* sebagai wadah untuk mempublikasikan artikel penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. I., Nurhadi, dan Basuki, I. B. (2016). Bentuk Hegemoni Kekuasaan dalam Tuturan Jokowi. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 4(4), 209-217. <http://journal.um.ac.id/index.php/jph/article/view/8204>.
- Alwi, H. (1992). *Modalitas dalam Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Eggs, S. (1994). *An Introduction to Systemic Functional Linguistics*. London: Printer Publisher.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London and New York: Longman.
- Fairclough, N. (1995). *Discourse and Social Change*. UK: Polity Press.
- Fairclough, N. (2001). *Language and Power (Edition 2)*. New York: Longman Inc.
- Gee, J.P. (1999). *An Introduction to Discourse Analysis, Theory and Method*. London: Routledge.
- Gerot, L., dan Wegnell, P. (1994). *Making Sense of Functional Grammar*. Sydney: Gerd Stabler.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers.
- Hasan, M. K. dan Ali, N. A. (2017). Hegemoni Ketua Partai terhadap Presiden dalam Majalah Tempo Edisi 13-19 April 2015 (Studi Analisis Wacana Kritis). *Jurnal Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 5(2), 36-41. DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/1f.v1i2.559>.
- Halliday, M, dan Mathiessen, M. (2004). *An Introduction to Functional Grammar*. New York: Oxford University Press. Inc.
- Kree, G. (1984). Linguistic and Ideological Transformations in news Reporting. Dalam *Language, Image, Media* (Davis H. Dan Walton, P. Eds). England: Basil Blackwell, 1984.
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis An Introction to Its Methodology*. UK : Sage Publication.
- Moleong, L. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakaraya.
- Sharififar, M. and Rahimi, E. (2015). Critical Discourse Analysis of Political Speech: A Case Study of Obama's and Rouhan's Speech at UN. *Journal Theory and Practice Language Study*, 5(2), 343-349. DOI: <http://dx.doi.org/10.17507/tpls.0502.14>.
- Sinaga, D. P., Kandagasari, N., dan Winarto, E. R. (2016). Critical Discourse Analysis of Jokowi's

- Speech at APEC CEO Summit 2014 by The Application of Transitivity. *ISFC 43 Proceeding Learning Language, Learning, Through Language, Learning about Language Glocalising Systemic Functional Linguistics*. Bandung: UPI.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Yogyakarta: Sanata Dharma University.
- Wiratno, T. (2018). *Pengantar Ringkas Linguistik Sistemik Fungsional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wodak, R. (1996). *Disorder of Discourse*. London dan New York: Longman.
- Van Dijk, T. A. (1998). *Ideology: Multidisciplinary Approach*. London: SAGE Publication.
- www.kompas.com (diunduh dalam rentang waktu Mei 2017 – Des 2019).